IT & ELEKTRONIK
HP, GADGET, DIGITAL, STUDIO FOTO, ELEKTRONIK, PERALATAN & PERABOTAN KANTOR

KANTOR CAPEM BANK BPD DIY DIRESMIKAN

Tingkatkan Layanan - Edukasi Digitalisasi

WONOSARI (KR) - Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY Santoso Rohmad mengungkapkan, diresmikannya Kantor Cabang Pembantu (Capem) Bank BPD DIY di Pasar Argosari untuk meningkatkan pelayanan.

Baik kepada usaha kecil menengah, maupun pedagang. Termasuk ke depan memberikan edukasi transaksi digital. Perkembangan pembangunan Gunungkidul dan pariwisata perlu didukung layanan transaksi digital. "Utamanya memang agar usaha kecil menengah di Kota Wonosari dan pedagang Pasar Argosari bisa dilayani dengan baik. Termasuk mensosialisasikan tentang transaksi digital. Bank BPD terus meningkatkan layanan melalui *mobile banking*, termasuk QRIS," kata Santoso Rohmad di acara Peresmian Kantor Capem BPD DIY di Pasar Argosari, Wonosari, Rabu (25/11).

KR-Dedy EW

Dirut BPD DIY Santoso Rohmad menyerahkan CSR kepada bupati.

Kegiatan dihadiri Bupati Gunungkidul Hj Badingah SSos, Ketua OJK Jimny Parjiman, Pemimpin BPD DIY Cabang Wonosari Arif Wijayanto, pejabat Bank BPD DIY, Kepala Dinas Perhubungan Wahyu Nugroho, Direktur Bank Daerah Gunungkidul Rini Widiyanti dan undangan.

Peresmian ditandai pemotongan pita oleh bupati. Bersamaan diserahkan CSR BPD DIY Rp 1,1 Miliar menyasar pembuatan sumur bor, bedah rumah, pemberdayaan perempuan, pengembangan perpustakaan desa, penanaman pohon, pipanisasi dengan PDAM, beasiswa bagi siswa kurang mampu, pelatihan pemasaran produk industri kecil dan penanganan Covid-19. **(Ded)**

Mendorong . . . . . .

Sambungan halaman 1

menahan dan menyimpan di tabungan dan deposito jauh lebih aman meskipun bunga rendah.

Menunda penurunan suku bunga acuan sampai dengan akhir tahun sebagaimana yang dilakukan bank sentral lain seperti Fed, BoE, dan ECB justru menyimpan permasalahan. Bank tidak dapat berlama-lama menahan dana yang tidak tersalurkan karena merupakan biaya yang harus ditanggung bank. Lihatlah bahwa salah satu bank swasta nasional tidak mampu menyalurkan kredit sampai Rp 200 triliun. Belum lagi bank pemerintah pun mengalami hal yang sama dalam jumlah Rp 270 triliun.

Sekarang yang terpenting adalah menunggu respons bank untuk ikut menurunkan suku bunga, baik simpanan maupun pinjaman. Tanpa respons dari bank, efektivitas penurunan suku bunga ini akan kurang berdampak pada perekonomian. Meskipun tidak banyak, terlihat bahwa penurunan suku bunga deposito dari 5,18% menjadi 4,93%.

Optimisme ini harus tetap dijaga. Terutama pertanda dari pertumbuhan ekonomi yang membaik yang hanya mengalami kontraksi sebesar 3,49%, lebih rendah dari kontraksi yang terjadi pada kuartal II sebesar 5,32%.

Kebijakan BI akan mencapai tujuannya apabila didukung oleh faktor internal yang justru kadang lebih tidak terkontrol dibanding eksternal. Kerumunan massa yang tidak terkontrol karena berbagai pelanggaran protokol kesehatan, akan memelencengkan arah tujuan tersebut. Sebutlah kerumunan pilkada, libur akhir pekan, dan euforia masyarakat karena pelonggaran akan membuat pulihnya ekonomi akan tertunda. Belum lagi kegaduhan yang tercipta antara pemerintah dan tokoh politik yang seolah tak pernah terselesaikan dengan baik dan menyeret alat keamanan negara pada pusaran tersebut.

Pertanyaan sulitnya adalah bagaimana menggerakkan perekonomian pada masa transisi melalui peningkatan konsumsi masyarakat, terutama masyarakat menengah atas. Ini terlihat dari meningkatnya simpanan di atas Rp 5 miliar yang tumbuh mencapai 15,2% dan simpanan Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar sebesar 10,1%. Padahal menurut data Bank Dunia, kelompok masyarakat pendapatan menengah atas di Indonesia lebih dari 52 juta orang. Dan konsumsi ini berkontribusi paling besar pada perekonomian Indonesia, mencapai 55%. *(Penulis adalah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Yogyakarta, peneliti senior Sinergi Visi Utama Consulting, dan Pengurus ISEI Cabang Yogyakarta)-d*

Dewan Minta Anggaran Padat Karya Ditingkatkan

LENDAH (KR)- Pelaksanaan padat karya sangat bermanfaat bagi masyarakat, selain menumbuhkan semangat gotong-royong, juga mampu mempercepat pembangunan infrastruktur di tingkat kalurahan. "Masyarakat juga antusias menjalankan program padat karya ini," kata Anggota DPRD Kabupaten Kulonprogo, Tukijan, Rabu (25/11).

Dicontohkan anggaran padat karya sebesar Rp 200 juta yang dialokasikan di Kalurahan Jatirejo, digunakan mengerjakan dua titik, yakni 385 meter di Pedukuhan Tegalsari, dan 170 meter di Pedukuhan Lendah.

Ketua DPRD Kulonprogo Akhid Nuryati SE mengapresiasi masyarakat Jatirejo yang penuh semangat gotong-royong mengerjakan jalan masyarakat dengan padat karya. Kualitas jalan hasil dikerjakan dengan padat karya, jauh sangat bagus dibandingkan dengan jalan yang dikerjakan pihak ketiga. "DPRD Kulonprogo akan memperjuangkan peningkatan anggaran program padat karya," tandasnya.

APBD Perubahan 2020, anggaran padat karya mencapai Rp 5 miliar. Anggaran itu dipakai membangun infrastruktur jalan, talud maupun drainase yang tak dapat dibiayai APBD, dan dana desa. **(Wid)**

Forkom Pokdarwis se Gunungkidul Dukung Immawan-Martanti

FORUM Komunikasi Kelompok Sadar Wisata atau Forkom Pokdarwis se-Gunungkidul melabuhkan dukungan ke pasangan Immawan Wahyudi dan Martanti Soenar Dewi. Deklarasi bertempat di komplek wisata Pantai Baron, Rabu (25/11).

Lebih dari 60 anggota Pokdarwis siap memenangkan pasangan nomor urut 02 ini. Mereka terdiri dari Pokdarwis dari unsur pantai, gunung, goa, dan air terjun. Calon Bupati Immawan Wahyudi turut hadir bersama para penggerak pariwisata itu.

Menurut Awanto Ketua Forkom Pokdarwis Gunungkidul, dukungan ini karena keberpihakan Immawan kepada Pokdarwis selama menjadi Wakil Bupati. "Selama ini kami selalu diberdayakan dan dilibatkan untuk membangun potensi wisata," ujar Pokdarwis dari Baron itu.

Di mata Pokdawris, Immawan dikenal sebagai pemimpin yang punya segudang cara untuk mengembangkan pariwisata. Kemajuan pariwisata di Gunungkidul saat ini tak lepas dari kontribusinya. "Pak Imm sangat terbuka dengan ide-ide Forkom Pokdarwis dan mensupport dengan programnya. Semua teman-teman mengakui itu," kata Aswanto.

Cabup Immawan Wahyudi mengapresiasi dukungan ini. Menurutnya, Pokdarwis adalah motor penggerak pariwisata. "Peran Pokdarwis sangat strategis sebagai motor penggerak pariwisata. Saya senang kerja sama yang sudah terbina selama 10 tahun akan terus berlanjut dengan dukungan ini," ujar tokoh Muhammadiyah itu.

Menurut Immawan, keberadaan Pokdarwis tidak sekadar mengelola wisata, melainkan mengelola ekonomi masyarakat sekitar. "Pokdawris bekerja dengan semangat kebersamaan, gotong royong dan saling memberdayakan. Hasilnya, kita bisa lihat, wisatanya maju, ekonominya berkembang, taraf hidup masyarakat naik. Ini luar biasa," terang Immawan.

Terpisah, Cawabup 02 Martanti Soenar Dewi mengaku terpesona saat mengunjungi wisata alam Cempluk Kesamben di Dusun Ngleri Lor Desa Ngleri Kapanewon Playen. Wisata yang dikenal dengan sky view ini berdiri sejak pertengahan 2018. Adalah Pokdarwis yang membuat Cempluk Kesamben terkenal dengan daya tarik hamparan gunung api purba ngelanggeran. "Wisata ini berkembang karena peran Pokdarwis. Mereka hebat, mampu menyulap lahan seluas 15 hektare menjadi wisata terkenal," ujar Martanti, Rabu (18/11).

Cempluk Kesamben menyajikan eksotisme alam dengan nuansa pepohonan dan Sungai Oyo yang berkelok. Ada pula spot foto yang menjulang jauh untuk menikmati matahari terbit dan tenggelam. Martanti memuji keberhasilan Pokdarwis yang kini dampaknya turut dirasakan masyarakat dusun.

"Pokdarwis membangun dusun dengan ekonomi wisata. Kami komitmen membangun fasilitas pendukung, seperti akses jalan dan jaringan internet yang lebih kuat," tegasnya. **(Has)**

KR-Istimewa

Forkom Pokdarwis bersama Immawan Wahyudi usai deklarasi dukungan.

Selamat Tinggal TV Analog, Selamat Datang TV Digital

Wahyu Kristian Natalia, MIKom
Dosen prodi Ilmu Komunikasi Universitas AMIKOM Yogyakarta

DALAM 2 tahun kedepan tepatnya tahun 2022 pemerintah melalui Kemenkominfo akan melakukan suntik mati TV analog atau analog switch off (ASO). Regulasi ini merupakan salah satu poin yang tertuang dalam RUU Cipta Kerja Omnibus Law disahkan DPR RI dan sudah ditandatangani oleh presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Adapun ketentuan yang mengatur deadline ASO tersebut tertuang di dalam Pasal 60A UU Cipta Kerja yang berbunyi: (1) Penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital. (2) Migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghentian siaran analog (analog switch off) diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini.

Secara umum perbedaan siaran televisi analog dan televisi digital terletak pada penerimaan visual atau gambar. Pada sistem penyiaran televisi analog 1 frekuensi hanya untuk satu channel, di sisi lain jarak juga sangat mempengaruhi pemancaran sinyal, sehingga apabila jarak televisi dari pemancar semakin jauh maka kualitas gambar akan semakin memburuk, bersemut atau "burek". Berbeda dengan sistem penyiaran televisi analog, pada sistem televisi digital, dikenal istilah multipleksing, yakni banyak konten bisa masuk ke 1 channel frekuensi bersamaan. Pada sistem penyiaran televisi digital, jarak relatif tidak memengaruhi pemancaran sinyal sehingga visual atau gambar akan tetap bening sampai titik sinyal tidak bisa diterima oleh stasiun televisi. ".

Tidak dipungkiri bahwa sejak adanya *youtube, consumer behaviour* masyarakat saat ini sangat beragam dan segmented, sehingga tidak bisa diblast dengan satu tayangan yang seragam. Migrasi televisi analog ke televisi digital ini memungkinkan televisi memproduksi acara sesuai segmentasi pasar tentunya menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positif itu diantaranya, dengan adanya televisi digital channel televisi akan semakin beragam, sehingga masyarakat bisa memilih channel di televisi sesuai selera. Dampak positif yang kedua tentunya gambar dari televisi digital lebih jernih atau bening tidak dipengaruhi pemancar. Ketiga saluran televisi digital semakin banyak,sehingga membuka peluang bagi masyarakat yang ingin berkecimpung di industri broadcasting. Tidak hanya itu saja, migrasi televisi analog ke televisi digital ini nantinya juga memberi dampak besar bagi perekonomian. Frekuensi yang dulunya digunakan oleh televisi analog dapat dimanfaatkan sebagai devidend digital berupa spektrum frekuensi yang bisa digunakan untuk mengembangkan ekonomi digital.

Di sisi lain, dampak negatif migrasi televisi analog ke televisi digital sejauh ini adalah masyarakat yang masih menggunakan televisi lama, sehingga membutuhkan alat tambahan berupa set top box (STB) agar bisa menerima siaran digital. Kini pasca regulasi tentang migrasi televisi analog ke televisi digital sudah selesai pemerintah dalam hal ini kemenkominfo gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat termasuk mempersiapkan infrastruktur pendukung agar masyarakat dapat menerima siaran televisi digital. Ada wacana bahwa pemerintah akan memberikan bantuan berupa set top box gratis yang akan dialokasikan untuk 6.7 juta masyarakat yang kurang mampu.

Migrasi siaran televisi analog menjadi siaran televisi digital semoga membawa angin segar untuk industri pertelevisian di Indonesia,sehingga tayangan televisi semakin beragam. Televisi tidak hanya menjalankan fungsi hiburan semata, namun juga memaksimalkan 4 fungsi lainya yakni sebagai media informasi, pendidikan, kontrol sosial dan fungsi peningkatan ekonomi maupun kebudayaan sebagaimana tertuang dalam pasal 4 UU penyiaran no 32 tahun 2002. ***

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park